

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) UUD Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia otonomi seluas-luasnya hingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Lembaga-lembaga, dan petugas yang mendapatkan wewenang untuk mencapai tujuan negara. Arti pemerintah dalam arti luas disini seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif atau alat-alat negara yang bertugas atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu mencakup organisasi yang menjalankan fungsi dari tugas pemerintahan. Titik beratnya hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi dari eksekutif saja¹. Salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah kecamatan. Sebagai sub sistem pemerintahan di Indonesia maka kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sebagai suatu organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab melayani kehidupan masyarakat yang penuh dengan dinamika, Kecamatan banyak menghadapi banyak masalah sebagai organisasi administratif, maka masalah yang di hadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibanding dengan masalah yang bersifat politis.

Nias merupakan pulau yang tingkat sumber daya alamnya melimpah dan kebudayaannya masih terjaga. Akan tetapi kualitas sumber daya manusia dan perekonomiannya rendah, terutama di Kecamatan Gido. Kecamatan Gido terdiri dari 21 desa dan beberapa desa diantaranya daerah pegunungan sehingga potensi sumber daya manusinya tergolong sangat rendah. Kemiskinan masih menjadi latar belakang rendahnya ekonomi masyarakat di Kecamatan Gido.

¹Sadjinono.(2008).Memahami Berberapa Bab Pokok Hukum Administrasi.Yogyakarta: Laksbang Pressindo,hal.41.

Menurut Anwas bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial, untuk memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya². Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan dengan banyaknya penduduk yang dilayani seperti asal-usulnya, pendidikan, umur maupun kemampuan ekonomi, karakteristik, wilayah serta banyak jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Gido.

Secara akademis pemberdayaan masyarakat dan dilakukan Karena masih ada ketidakberdayaan masyarakat (marginalisasi, keterisolasian dan keterbatasan masyarakat). Hal-hal lainnya adalah isu kemiskinan, ketimpangan yang masih terjadi, banyak program-program yang tidak berkelanjutan yang terdiri dan justru menimbulkan ketergantungan masyarakat, ketidakberdayaan dapat disebabkan oleh kondisi struktrutural yang mengandung diskriminasi dan dominasi³. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS kemiskinan di Kabupaten Nias berada pada angka 16 % dan kemiskinan ekstrim sebesar 3,11%. Hal ini dikarenakan karena berbagai faktor seperti ketimpangan pendapatan, pendidikan yang rendah akses pelayanan kesehatan yang terbatas ,akses barang dan jasa, lokasi geografis, masalah gender dan termasuk lingkungan. Untuk itu di perlukan penanggulangan kemiskinan melibatkan pemangku kepentingan, melalui berbagai kebijakan dan startegi dengan memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan aksi terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan inklusif.

Terkait dengan kondisi ini, maka dibutuhkan peran kepemimpinan dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi masyarakat dan tepatnya sasaran dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dapat terjaminnya kehidupan masyarakat. Maka dibutuhkan pelaksanaan program kegiatan untuk membangun keberdayaan masyarakat melalui interaksi masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian suatu kegiatan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

² Anwas, Oos M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta, h. 14.

³ Adi, I. Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 45.

masyarakat. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain tugas tersebut camat mengembangkan tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di Wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta melaksanakan tugas lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerinah lainnya di Wilayah Kecamatan.

PP. No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, antara lain menyebutkan bahwa salah satu tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas camat adalah mengkoordinasikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan, yang meliputi : mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Kecamatan Gido merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Nias dalam hal pemberdayaan masyarakat. Beberapa tahun terakhir ini banyak program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten, terutama program pemberdayaan masyarakat golongan bawah atau kurang mampu. Untuk tahun 2023 pemerintah Kecamatan Gido lebih memfokuskan tugas dan fungsinya di pemberdayaan masyarakat desa pada program prioritas. Program prioritas merupakan program-program yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kecamatan Gido sebagai salah satu kecamatan yang terdiri dari 21 desa dan beberapa desa diantaranya adalah desa tertinggal. Atas dasar itu diperlukan bentuk - bentuk pemberdayaan yang dapat berupa pembangunan-pembangunan infrastruktur setiap desa yang tertinggal, penyaluran Bantuan Langsung kepada masyarakat miskin secara tepat sasaran, pelayanan terhadap kesehatan dan program ketahanan pangan yang tidak lepas dari pengawasan dan pengevaluasian pemerintah Kecamatan Gido sebagai hasil pelimpahan kewenangan dari Bupati Nias.

Berdasarkan data yang di peroleh dijelaskan bahwa dari 21 Desa di kecamatan Gido dapat di klarifikasikan ke dalam beberapa kategori diantaranya 1 Desa kategori sangat tertinggal, 9 Desa kategori tertinggal dan 11 Desa lainnya kategori masih berkembang, sehingga di butuhkan pemberdayaan yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat terutama untuk desa tertinggal lebih diutamakan pada program prioritas pembangunan desa yang dapat berupa pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, jembatan serta pelayanan kesehatan kepada balita dan ibu hamil karena biasanya desa-desa yang tertinggal rawan terjangkau penyakit stunting. Desa yang berkembang lebih memfokuskan pada program ketahanan pangan. Selain pemberdayaan masyarakat diatas maka di perlukan juga program pemberian bantuan kepada masyarakat-masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Gido, sehingga strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi dalam menjalankan tugas diantaranya seperti berupa pengevaluasian, pengawasan, pembinaan, perencanaan dan penyusunan program penurunan stunting akan tetapi belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan masalah diatas peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang masalah yang berkaitan dengan strategi tersebut apakah sudah di jalankan dengan baik atau sebaliknya kepada desa yang ada di Kecamatan Gido. Indikasi strategi tersebut nampaknya menarik untuk dikaji

secara lebih mendalam melalui suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu dalam rangka penulisan skripsi penulis tertarik mengangkat judul **“Strategi Pemerintah Kecamatan Gido Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa”**.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan tertentu. Dengan kata lain rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan di cari jawabannya yang dapat berupa fakta atau kebenaran dengan cara melakukan penelitian atau mengumpulkan data. Sugiyono mengatakan bahwa setiap penelitian yang akan dilakukan hanya berangkat dari masalah walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering menjadi hal yang paling penting sulit dalam proses penelitian⁴. Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah adalah **“Bagaimana Strategi Pemerintah Kecamatan Gido Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui strategi pemerintah Kecamatan Gido dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang pemberdayaan masyarakat desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap kiranya bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri maupun bagi para pembaca,ataupun kepada pihak lain yang berkepentingan,adapun manfaat lain penelitian ini adalah:

⁴ Sugiyono.(2017).Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D.Bandung:Alfabeta CV,h.32.

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pembahasan mengenai kebijakan publik yang mengarah pada konsep pemberdayaan masyarakat desa.
2. Penelitian dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.

b. Secara Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Kecamatan Gido dalam mengambil langkah atau strategi yang berhubungan pada pelayanan publik terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat desa.
2. Sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi pemerintah kecamatan setempat dalam mengambil strategi peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Sebagai sumber informasi kepada masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat desa.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Teori Penelitian

2.1.1 Konsep Strategi

a) Pengertian Strategi

Arti kata dari strategi berasal dari bahasa Inggris yaitu *strategy*. Dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary* dijelaskan bahwa “strategi is a plan that is intended to achieve a particular purpose”⁵, artinya strategi merupakan sebuah rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan khusus. Menurut Chandler dalam Umar strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan yang dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya⁶. Menurut Stainer dan Minner, Strategi adalah penetapan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi, dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai⁷.

Menurut Sondang Siagian, strategi adalah cara yang terbaik untuk mempergunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai tuntutan perubahan lingkungan⁸. Dari beberapa definisi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa strategi ialah satu kesatuan rencana yang terpadu yang di hubungkan dengan lingkungan organisasi dengan cara membuat pilihan alternatif-alternatif untuk di pertimbangkan dan dipilih, sehingga strategi yang dipilih akan di implementasikan oleh organisasi dan akhirnya memerlukan evaluasi terhadap strategi tersebut dengan tujuan tercapainya cita-cita organisasi. Pengertian strategi secara umum dapat diartikan sebagai upaya seseorang atau organisasi untuk

⁵ Anwar, Muhadjir. (2010). *Manajemen Strategik Daya Saing dan Globalisasi*. Bayumas: Sasanti Institute, h.2.

⁶ Umar, Husein. (2010). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Raja Grafindo, h.16.

⁷ George A Stainer dan Jhor Minner, *Manajemen Strategik*. Jakarta : Erlangga, h.20

⁸ Sondang Siagian . (1986). *Analisis Serta Kebijakan dan Strategi Organisasi* . Jakarta: PT Gunung Agung. Cet ke -2, Hal.17.

membuat skema untuk mencapai sasaran yang hendak di tuju. Dengan kata lain, strategi sebagai seni seseorang ataupun organisasi memanfaatkan seni ,kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran lewat cara-cara yang lebih efektif dan efisien demi mencapai keuntungan yang diharapkan. Sebuah perusahaan atau organisasi tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan atau keinginan tersebut, tentu saja sebuah perusahaan atau organisasi harus memiliki langkah-langkah atau cara serta rencana strategi agar capaiannya mampu maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan dari awal cara atau langkah untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sebuah program-program, kebijakan, maupun keputusan.

Strategi memiliki ciri atau karakteristik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuncoro ciri-ciri strategi antara lain:⁹

- 1) Good directed action, yaitu aktivitas yang menunjukkan apa yang diinginkan organisasi dan bagaimana mengimplementasikan nya.
- 2) Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas) yang harus memperhatikan rintangan dan tantangan.

b) Tipe-Tipe Strategi

Pada dasarnya setiap sebuah organisasi yang mempunyai strategi dimanfaatkan untuk dapat mencapai suatu tujuan di organisasi yang sudah ada atau yang sudah direncanakan. Jenis-jenis strategi yang digunakan dalam sebuah organisasi tidak semua sama karena ada beberapa strategi yang digunakan sesuai dengan tujuan yang telah resmi. Terdapat sebagian jenis strategi yang digunakan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah diresmikan. Salusu, mengatakan dalam strategi ada beberapa tipe-tipe strategi yang digunakan dalam sebuah organisasi, antara lain:¹⁰

⁹ Ibid.,h.1.

¹⁰Saputra,Aldi.dan Novianta, Rulandari. "Analisis Startegi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2019". Jurnal Pajak Vokasi(JUPASI) .1(2020):14-15.

- 1) Corporate Strategy (Strategi Organisasi) Strategi ini menjelaskan dengan bagaimana tujuan, nilai-nilai, formulasi misi, serta inisiatif-inisiatif formulasi strategi baru. Pembatasan-pembatasan dibutuhkan, supaya mengetahui apa yang dilakukan serta untuk apa strategi itu digunakan.
- 2) Program Strategy (Strategi Program) Dalam Strategi ini lebih memberi tinjauan pada implikasi-implikasi strategi dari beberapa program tertentu yang mampu di kira-kira apa bagaimana akibatnya apabila suatu program tertentu dilaksanakan ataupun diperkenalkan (apa akibatnya untuk sasaran organisasinya).
- 3) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) Strategi ini dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya esensial yang ada serta berguna untuk meningkatkan mutu kinerja sebuah organisasi. Sumber daya itu dapat berbentuk tenaga, keuangan, teknologi serta sebagainya.
- 4) Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan) Fokus dari strategi institutional ialah meningkatkan keahlian organisasional guna dalam melakukan inisiatif-inisiatif strategi yang telah direncanakan.

c) Manfaat Strategi

Suatu strategi dibuat dalam suatu organisasi pasti saja mempunyai khasiat guna organisasi tersebut, baik itu menyangkut tentang bagaimana organisasi dapat berjalan, tumbuh menampilkan perkembangan ke arah yang positif, sanggup bertahan terlebih lagi sanggup untuk menjadi suatu zona organisasi yang unggul dibanding organisasi yang lain. Oleh sebab itu, Dirgantoro membagikan sebagian arti dari strategi berikut ini:¹¹

- 1) Selaku fasilitas guna mengkomunikasikan tujuan organisasi serta memastikan jalur mana yang wajib ditempuh untuk mencapai tujuan.
- 2) Guna tingkatan keuntungan organisasi meski peningkatan keuntungan organisasi bukan secara otomatis dengan mempraktikkan strategi.

¹¹ Dirgantoro,C.(2001).Manajemen Strategik :Konsep Kaus,dan Implementasi.Jakarta:Grasindo, h.7.

- 3) Menopang mengidentifikasi, memprioritaskan serta mengeksploitasi kesempatan.
- 4) Mempersiapkan pemikiran terhadap manajemen problem.
- 5) Menggambarkan framework untuk tingkatkan koordinasi serta kontrol terhadap kegiatan.
- 6) Meminimumkan pengaruh serta pergantian.
- 7) Membolehkan keputusan utama untuk menunjang tujuan yang diresmikan.
8. Mengizinkan alokasi waktu serta sumber energi yang efisien.
- 8) Menopang sikap yang lebih terintegrasi.

d) Manajemen Strategi

Manajemen strategis merupakan sebuah sistem sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dari beberapa komponen yang ada dan saling mempengaruhi serta bergerak serentak secara bersama-sama menuju arah yang sama.¹² Manajemen strategi dapat menjadikan sebuah organisasi untuk dapat mengimplementasikan strategi baik nya melalui perencanaan program, proses anggaran sistem manajemen dan prosedur program dan proyek. Proses manajemen strategi secara umum menurut Yunus dapat dicapai melalui tiga langkah yang terdiri dari:¹³

- 1) Perumusan Strategi (Formulating Strategy) Formulasi strategi berisi tentang mengembangkan visi dan misi yang telah dibuat, guna mengidentifikasi peluang-peluang serta ancaman-ancaman dari luar organisasi, dalam menetapkan tujuan-tujuan (sasaran-sasaran) jangka panjang, dan dapat menghasilkan strategistrategi tertentu untuk dijalankan.
- 2) Implementasi Strategi (Implementing Strategy) Implementasi strategi diadakan supaya mampu menetapkan sasaransasaran per-tahun, menetapkan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya direncanakan, memotivasi dan mengalokasikan sumber daya supaya strategi yang ada dapat dirumuskan dan dilaksanakan.

¹² Sugiarti,E.,Supratikta,H.dan Catio,M.(2022).Manajemen Strategi.Pamulang:Unpam Press,h.29.

¹³ Yunus,E.(2016).Manajemen Strategis.Yogyakarta:Andi Offset,h.14.

- 3) Evaluasi (Evaluating) Evaluasi strategi yakni tahapan terakhir dalam suatu manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi belum dapat berjalan. Sehingga dapat disimpulkan jika, manajemen strategis merupakan sesuatu perencanaan yang mencakup pengambilan keputusan, formulasi visi-misi, penerapan sesuatu rencana guna meraih tujuan yang sudah diresmikan dan penilaian hasil pengimplementasian dari rencana ataupun kebijakan yang sudah diresmikan.

Implementasi strategi merupakan proses di mana manajemen mewujudkan strategi serta kebijakannya dalam kegiatan melalui pengembangan program, anggaran serta prosedur. Untuk mengimplementasikan suatu strategi, industri membutuhkan rumusan program, anggaran yang hendak membiayai penerapan program, serta prosedur untuk membenarkan program berjalan semacam yang diharapkan.

Menurut Hunger dan Thomas Wheelen (2003) di dalam manajemen strategi, terdapat suatu proses. Proses menunjukkan input yang dimasukkan demi pencapaian tujuan organisasi yang harus diproses dan dikendalikan atas dasar output (realisasi) yang disesuaikan dengan apa yang diinginkan/diharapkan oleh organisasi. Teori Manajemen Strategi ini menjelaskan secara detail dan sistematis kegiatan manajemen strategi yang terdiri dari pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi yang secara detail sebagai berikut :¹⁴

1. Pengamatan lingkungan, yaitu tahap dimana pimpinan perlu menyadari bahwa organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perjalanan organisasi dipengaruhi oleh suatu peristiwa, perkembangan, dan perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Perubahan tersebut bisa berasal dari luar organisasi atau faktor eksternal dan dari dalam organisasi atau faktor internal. Pengamatan lingkungan terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
2. Perumusan strategi, yaitu tahap pengambilan keputusan mengenai alternatif strategi yang akan dipilih oleh organisasi. Strategi yang dipilih

¹⁴ Wheelen, J.D. (2003). Manajemen Strategi. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta, h.9-12.

merupakan hasil dari pengamatan lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya. Proses perumusan strategi terdiri dari penetapan misi, sasaran, kebijakan dan strategi.

3. Implementasi strategi, yaitu pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan atau direncanakan. Proses implementasi strategi adalah program , anggaran dan prosedur.
4. Evaluasi dan pengendalian, yaitu proses membandingkan kinerja dan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan. Proses evaluasi terdiri dari pengukuran kinerja dan standar kinerja.

Berdasarkan teori diatas mengenai strategi disini peneliti menggunakan teori Hunger dan Wheelen (2003) yang menyebutkan manajemen dan strategi,dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis merupakan suatu usaha pengelolaan rencana mulai dari penyusunan rencana sampai evaluasi hasil dari rencana suatu organisasi demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ada pula bagi Amminah dan Nasir ukuran implementasi strategi terdiri dari:¹⁵

a. Program

Program merupakan statement aktivitas- aktivitas ataupun langkah-langkah yang dibutuhkan guna menuntaskan perencanaan.

b. Anggaran

Anggaran merupakan program yang dinyatakan dalam wujud satuan uang, setiap program yang hendak dinyatakan secara rinci dalam anggaran, yang dapat digunakan oleh manajemen guna merancang serta mengatur. Guna anggaran dalam suatu strategi antara lain merupakan jika industri mempunyai rencana terpadu yang bisa digunakan selaku pedoman pendanaan penerapan aktivitas

¹⁵ Amminah,M.A.dan Nasir,U.”Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada MTsN Kota Lhokeumawe”.Jurnal Administrasi Pendidikan,Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.2(2015):h.50.

strategi, perlengkapan koordinasi, perlengkapan pengawasan kerja serta perlengkapan penilaian strategi.

c. Prosedur/Standar Operational Procedur (SOP)

Prosedur ataupun kerap diucap SOP merupakan sistem langkah-langkah ataupun teknik-teknik yang berentetan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas ataupun pekerjaan dituntaskan.

2.1.2 Pelayanan Publik

a. Pengetian Pelayanan Publik

Manusia diciptakan sebagai makhluk sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri manusia memerlukan bantuan dari orang lain yang dapat berupa pelayanan yang baik. Pelayanan yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya yang dapat berupa barang ataupun jasa. Dalam buku Djaenuri pelayanan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang merupakan perwujudan dari tugas umum pemerintahan mengenai bidang tugas pokok suatu instansi untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.¹⁶ Kata dasar "Pelayanan" menurut Pasolong, didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.¹⁷ Sedangkan definisi "Pelayanan Publik" menurut Mahmudi, adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Definisi lain Pelayanan publik menurut Harbani Pasolong adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

¹⁶ Djaenuri.(1998).Sistem Pelayanan Masyarakat.Jakarta:Rineka Cipta,h.15.

¹⁷ Pasolong,Harbani.(2010).Teori Administrasi Publik .Jakarta: Alfabeta,hal.85.

¹⁸ Mahmudi.(2010).Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta:UPP STIM YKPN,Hal.223.

Sementara Sinambela dalam buku "Reformasi Pelayanan Publik" menyatakan bahwa "Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.¹⁹ Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain."

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah ,sehingga pelayanan tersebut disebut sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintahan demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan Dalam perkembangannya pelayanan publik sangat erat hubungannya antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemberi layanan terhadap masyarakat yang dapat berupa barang ataupun jasa yang sudah menjadi hak masyarakat.

b. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu penyelenggara Negara/pemerintah, penyelenggara perekonomian dan pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badan usaha/badan hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/ atau dikontrak untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat umum atau swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan publik yang tidak mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu :

¹⁹ Sinambela dan Poltak ,LJjan.(2014).Reformasi Pelayanan Publik.Jakarta: Bumi Akasara,Hal.14.

- 1) Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah,
- 2) Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan,
- 3) Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik, sebagai regulator/pembuat peraturan (rule government/peraturan pemerintah) harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

c. Standar Pelayanan Publik

Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik pelayanan yang diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan. Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat dan/atau stakeholder lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan saran dan masukan dan membangun kepedulian dan komitmen dalam Sinambela (2010), secara teoritis tujuan pelayanan publik pada

dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :²⁰

- 1) Transparan Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- 2) Akuntabilitas Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kondisional Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- 4) Partisipatif Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 5) Kesamaan Hak Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain.
- 6) Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada umumnya pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penerapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan (on going proses) sepanjang hidup seseorang atau masyarakat. Dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu. Individu yang mengalami masalah kemiskinan dan keterbelakangan.

²⁰ Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. (2011).Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta:Bumi Aksara,h.6.

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya²¹. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya²². Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas menurut Foy, Pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya²³. Pemberdayaan Menurut Sadan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan²⁴.

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut

²¹ Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, h.79.

²² Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, h.134-135.

²³ Foy, Nancy. (1994). *Empowering People at Work*. Cambridge : Gower Publishing Ltd. h.11.

²⁴ Sadan, Elisheva. (1997). *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Sosial Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publisher, h.32-36.

memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya²⁵.

b. Prinsip Pemberdayaan

Dalam melaksanakan pemberdayaan, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Berdasarkan hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat diuraikan beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat antara lain: ²⁶

- 1) Aktivitas pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi subjek pemberdayaan.
- 2) Proses pemberdayaan dapat dimulai dengan menumbuhkan kesadaran akan potensi serta kebutuhan yang dibutuhkan subjek pemberdayaan.
- 3) Pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, karena pemberdayaan merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu. Pendampingan dan pembinaan harus dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan mengingat subjek pemberdayaan memiliki keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya.
- 4) Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Hal ini dapat dilakukan dengan tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- 5) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada subjek pemberdayaan sebagai bekal menuju kemandirian.
- 6) Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia.
- 7) Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat (agen pemberdayaan) yang memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup dan dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

²⁵ Soetomo.(2006).Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.h.312.

²⁶ Oos M. Anwas.(2014). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.Bandung: ALFABETA, h. 58-60.

c. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu proses belajar hingga tercapai sebuah kemandirian. Kemandirian yang telah dicapai kemudian harus dijaga dengan cara melakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara berkelanjutan agar tidak mengalami kemunduran. Proses belajar guna mencapai kemandirian ini tentunya dilakukan secara bertahap. Suharto menyampaikan beberapa indikator dalam pemberdayaan antara lain:²⁷

- 1) Merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif,
- 2) Memperbaiki kehidupan masyarakat,
- 3) Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan
- 4) Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Dalam upaya mencapai indikator dalam pemberdayaan tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh dalam proses pemberdayaan yang pertama, meningkatkan akses ke dalam aset produksi. Dan yang kedua yaitu dengan memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan pemberdayaan di antaranya:

- a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju kesadaran dan kepedulian akan pentingnya peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahapan awal di mana aktor pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi agar dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan guna menambah wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat berperan dalam pembangunan. Pada tahap kedua ini masyarakat belajar tentang pengetahuan dan kecakapan atau keterampilan yang memiliki hubungan dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Masyarakat memberikan partisipasi pada tingkat yang rendah, yakni sebagai objek pembangunan.

²⁷ Oos M. Anwas.(2014). Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.Bandung: ALFABETA, h. 49.

- c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan atau keterampilan sehingga terbuka inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kemandirian.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai konsep strategi dan pemberdayaan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan merupakan suatu rangkaian perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan atau sasaran dari proses pemberdayaan. Strategi atau pendekatan-pendekatan dalam pemberdayaan perlu dirancang agar proses pelaksanaan pemberdayaan lebih sistematis, terencana, dan sesuai dengan keadaan objek yang akan di berdayakan. Mardikanto dan Soebianto menyampaikan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, antara lain:²⁸

- a) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan partisipasi masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang sesuai serta relevan dengan penelitian ini. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi penulis mengangkat sebagai referensi untuk menambah bahan kajian pada penelitian. Adapun yang telah melakukan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian dari Jurnal Ismail Rachman yang berjudul tentang Peranan Camat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi di Kecamatan Lekupang Timur Kabupaten Minahasa Utara). Pada penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif . Pemilihan informan sebanyak 7 orang dengan ketentuan dipilih informan kunci dan informan pelengkap. Hasil dari pembahasan jurnal tersebut adalah Camat memiliki peranan penting dalam

²⁸Mardikanto, Totok., dan Perwoko Soebiato.(2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.Bandung: ALFABETA), h. 168.

melaksanakan tugas pemberdayaan kepada masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat desa di aplikasikan dengan pembentukan model program unggulan seperti pemberian dana bantuan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk program pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah bidang kesehatan, pendidikan, sektor informal, pertanian, perikanan, peternakan dan pelaksanaan pembangunan. Beberapa hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat antara lain adalah: hambatan struktural, sikap mental masyarakat dengan pola hidup konsumtif, dan tingkat pendidikan penerima dana masih cukup rendah. Hal ini akan menghambat proses perubahan dan pemberdayaan²⁹. Penelitian Ismail Rachman peneliti hanya mengambil sebagian bahan yang dijadikan sebagai tinjauan, karena memiliki objek yang sama yaitu di kantor kecamatan. Pada referensi penelitian diatas membahas tentang peranan camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi pemberdayaan masyarakat Desa.

Kedua, penelitian dari Jurnal Erdiyansah Tanjung yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif metode studi kasus. Dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah purpose sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan), sehingga informan kunci merupakan orang yang dianggap mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi belum berjalan secara maksimal. Pada setiap tahapan/proses pemberdayaan, masyarakat tidak dilibatkan secara penuh sehingga program pemberdayaan yang dihasilkan bukanlah program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan juga mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber daya yang ada. Mulai dari akses informasi dan teknologi, akses modal, hingga akses pasar. Proses pendampingan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan ini juga tidak berjalan dengan maksimal. Faktor yang

²⁹ Rachman, I. dkk. (2017). Peran Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Eksekutif, 1(1). h.12.-21

menyebabkan ketidakmaksimalan pelaksanaan pendampingan kelompok nelayan di Gunungsitoli Idanoi pada dasarnya disebabkan oleh keterbatasan tenaga pendamping perikanan, baik dari segi pengetahuan dan keterampilan maupun dari segi jumlah, dan keterbatasan sarana dan prasana pendukung. Pada penelitian dari Ardiyansyah Tanjung objek utama adalah dinas-dinas yang berhubungan dengan program pemberdayaan masyarakat Desa dan camat³⁰. Referensi penelitian diatas lebih membahas tentang pemberdayaan masyarakat nelayan di kecamatan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah Camat dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Ketiga, penelitian dari Jurnal Vianita Satriani Pananginan, Sofia Pangeman dan Frans Singkoh yaitu Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pusomalu Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yang digunakan pada penelitian ini adalah camat, dan sampel 3 orang masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kusomalu Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut selama ini dengan baik. Peranan yang baik, pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Pusomaen terdiri dari 2 kegiatan yakni fisik dan non fisik. Pemberdayaan secara fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan pemerintah Kecamatan adalah memberikan pembinaan dan pengawasan. Pemberdayaan non fisik berupa pelatihan-pelatihan keterampilan, memfasilitasi kegiatan musrenbag kecamatan dengan menampung aspirasi program dari Desa³¹. Penelitian tersebut lebih berfokus pada peranan Camat sedangkan pada penelitian ini berfokus pada strategi Pemerintah Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat Desa.

Keempat, penelitian dari jurnal Suhandi yaitu Peran Camat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi

³⁰ Tanjung, A. T. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 13(1).h.155–172.

³¹ Pananginan, V. S. dkk. (2019). Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Eksekutif*, 3(3). h.1-11.

dan wawancara. Hasil penelitian ini diketahui atas keberhasilan Camat Ciledug dengan kapasitasnya kemampuan memberikan bimbingan, penugasan dan koordinasi kepada pelaksanaan Renovasi Perumahan Tidak Layak Huni di Tajur dan Desa Paninggilan sebagai ruang lingkup aktivitas manusia pembangunan, dan membentuk lembaga yang bisa termasuk aktif peran serta Desa bersama RW dan RT, serta Masyarakat Badan Kemandirian (BKM) di masing-masing Desa dan secara keseluruhan masyarakat telah menunjukkan peran Camat sebagai kebijakan, sebagai alat komunikasi, dan sebagai strategi. Ketiga peran ini dilakukan dengan prinsip solidaritas, keterbukaan, musyawarah dan partisipasi, begitulah dapat memperoleh pemecahan masalah melalui sosialisasi untuk memberikan penjelasan untuk masalah pengaduan masyarakat setempat menjadi prioritas penerima manfaat, serta adapun hambatan dalam peranan tersebut ialah keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Tangerang yang tidak sebanding dengan data penduduk yang perlu dilakukan pembangunan renovasi rumah yang tidak layak huni di wilayah Kecamatan kepada Camat Ciledug³². Persamaan dari penelitian ini adalah objek yang di kaji adalah Camat setempat. Penelitian dari Suhandha berfokus pada peran camat dalam pemberdayaan pada Program Renovasi Rumah sedangkan pada penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Kelima, penelitian dari jurnal Pranki Rahmat yaitu Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Sungai Penuh . Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Pemilihan informan dalam penelitian ini berasal dari aparatur pemerintah Kecamatan dan desa, terdiri dari Camat Kumun Debai dan Kepala Desa beserta Ketua BPD di kecamatan Kumun Debai. Pengumpulan data melalui wawancara. Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh mencakup Indikator Peran sebagai suatu kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat komunikasi, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Adapun hasil penelitian yang telah diperoleh, meliputi: Peran camat Kumun Debai dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran sebagai suatu strategi telah

³² Suhandha.(2017). Peran Camat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang: Jurnal Renaissance, 2(2).h.278-286.

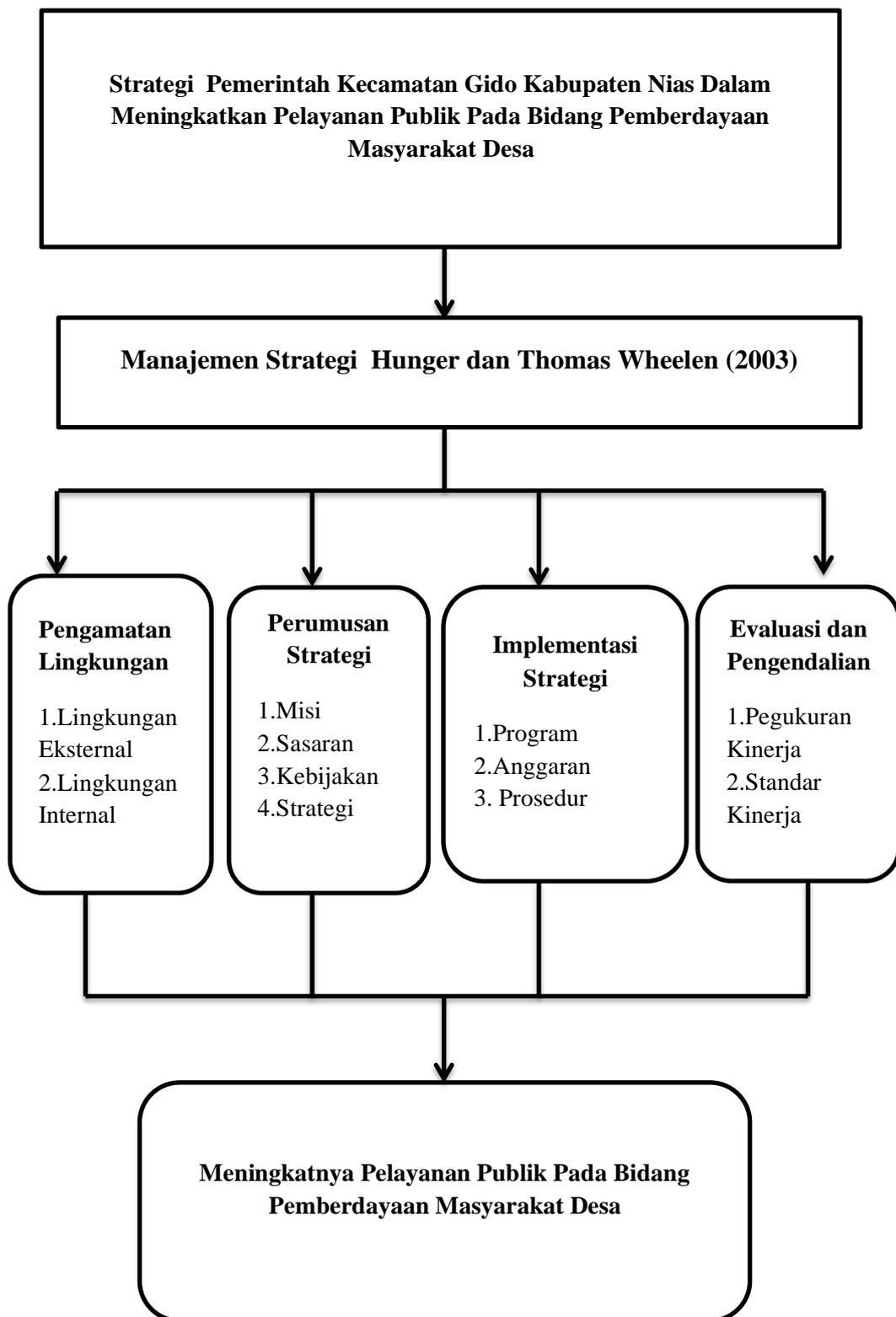
dijalankan dengan cukup baik dengan mengikut sertakan semua elemen masyarakat dalam mensosialisasikan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat; Peran camat dalam bentuk kebijakan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembinaan terhadap unit – unit kerja pemerintah dan organisasi dari RT, Kepala Dusun, kepala desa dan perwakilan masyarakat; Peran camat melalui jalur komunikasi sekaligus medium penyelesaian sengketa dalam pemberdayaan masyarakat dijadikan sebagai instrument pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan³³. Persamaan penelitian jurnal Pranki Rahmat dengan penelitian ini adalah objek yang di kaji adalah Kantor Camat dan sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat Desa. Perbedaan penelitian Pranki Rahmat dengan penelitian ini adalah berfokus pada peran dan metode yang di pakai adalah deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti berfokus pada strategi dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.

Kerangka berfikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Oleh karena itu, kerangka berpikir dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep penelitian. Dengan demikian, kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai alur logis yang berjalan melalui penelitian. Dalam kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian bisa dijelaskan dengan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dari permasalahan yang di kaji diatas penulis membuat kerangka berpikir seperti pada gambar di bawah ini :

³³ Rahmat,Pranki.(2021). Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Sungai Penuh : Jurnal Administrasi Pemerintahan Nusantara Mahasiswa (JAN Maha), 3(5).h.1-11.



Gambar 1 Teori Hunger and Wheelen (2003)